

OPTIMALISASI STRATEGI POLRI DALAM PELAKSANAAN TUGAS BHABINKAMTIBMAS GUNA Mendukung PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI POLDA JATENG

Fania Mutiara Savitri
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
faniamutiara@walisongo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui faktor internal dan eksternal dengan adanya personel Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas Polri Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng serta merumuskan optimalisasi strategi pemberdayaan aparat Polri sebagai sumber daya pendukung dengan adanya upaya optimalisasi aplikasi E-Mutasi Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan faktor internal dan eksternal dilakukan untuk mengetahui strategi apa yang tepat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Polda Jateng. Strategi tersebut dapat dilaksanakan guna mencapai penerapan protokol kesehatan yang maksimal sehingga dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19. Diharapkan Polri mampu menerapkan strategi dengan baik agar capaian dari tugas yang dilaksanakannya maksimal.

Kata kunci : Strategi, faktor internal, faktor eksternal, Polri, Protokol kesehatan.

ABSTRACT

This research was conducted in order to determine internal and external factors with efforts to optimize Bhabinkamtibmas personnel in the implementation of the National Police's duties to Support the Implementation of the Covid-19 Health Protocol at the Central Java Regional Police and to formulate an optimization strategy for the empowerment of the National Police as a supporting resource with optimization efforts. the Bhabinkamtibmas E-Mutation application in the Implementation of the Covid-19 Health Protocol at the Central Java Police. The method used in this research is qualitative with data collection techniques through interviews and observations. The analysis technique used is the SWOT technique. The results showed that the formulation of internal and external factors was carried out to determine what strategies were appropriate to support the implementation of duties in implementing the Covid-19 health protocol at the Central Java Police. Where this strategy can be implemented in order to achieve maximum application of health protocols so as to reduce the spread of the Covid-19 virus. It is hoped that the National Police will be able to implement the strategy properly so that the achievement of the tasks it carries out is maximized.

Keywords: Strategy, internal factors, external factors, Police, health protocol.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Adanya Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia Undang-Undang No.2 tahun 2002 (Pasal 4). Dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah berhadapan dengan masyarakat, polisi dihadapkan pada tanggung jawab yang besar. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi dan kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Negara dan masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas Polisi sebagai terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib skala nasional (KAMTIBMAS) yang kondusif.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut: *Asas legalitas*, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum. *Asas kewajiban*, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum. *Asas partisipasi*, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat. *Asas preventif*, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat. *Asas subsidiaritas*, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Mengingat adanya virus Covid-19 yang menyebar di Negara Republik Indonesia maka dari segi asas partisipasi polisi terutama Bhabinkamtibmas sebagai Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, yang salah satu tugasnya adalah ikut serta memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit langsung ke desa binaan. Peran Bhabinkamtibmas dalam pandemic ini berupa penertiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan peraturan lainnya yang mampu menambah penyebaran virus. Sehingga di era pandemi ini masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan mengingat bahaya dari penyebaran virus Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja melainkan juga berbagai sektor (Kompasiana.com). Dalam hal ini Polri terutama Bhabinkamtibmas sebagai penegak keamanan dan ketertiban masyarakat berperan penting dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 setelah gugus terdepan (pasukan kesehatan) wajib siaga dalam mendukung upaya pemerintah dalam menangani kasus pandemic COVID-19 ini.

Bhabinkamtibmas sebagai personel Polri yang turun ke tingkat desa/kelurahan dengan tugas dan fungsi bermitra bersama masyarakat, tentunya disaat pandemic Covid-19 seperti saat ini sangat dibutuhkan perannya. Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak penanganan untuk memutus mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut. Salah satu hal yang dilakukan Bhabinkamtibmas adalah memberikan bantuan social kepada warga terdampak Covid-19. Dengan menjalin sinergitas dengan TNI, perangkat desa dan petugas kesehatan desa binaannya Bhabinkamtibmas diharap mampu membantu menghentikan penyebaran Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 ini menyebabkan beberapa pekerja dirumahkan (*work for home*) oleh karena adanya aplikasi E-mutasi sebenarnya sangat memudahkan Bhabinkamtibmas untuk melakukan perpindahan tugas di daerahnya masing-masing sehingga penertiban dan pengamanan masyarakat dari virus Covid-19. Mengingat aplikasi E-mutasi merupakan program internal dalam pengelolaan SDM, khususnya penempatan personel.

Dikeluarkannya segala peraturan mulai dari Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) hingga Peraturan Walikota (Perwal) menunjukkan upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Sampai pada akhir tahun 2020 penyebaran Covid-19 masih mengalami peningkatan dengan total kasus sebanyak 636 ribu jiwa, kasus terbanyak dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini terjadi setelah dijalankannya program pemulihan ekonomi oleh pemerintah dengan penerapan new normal. Karena lengahnya kondisi masyarakat menyikapi New Normal ini, pada akhirnya pemerintah kembali menekankan peraturan Inpres No.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Kemungkinan peningkatan tersebut terjadi juga karena tidak adanya personel Bhabinkamtibmas yang mengawasi lingkungan sebab adanya penerapan New Normal. Dimana setelah itu diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali. Dimana hal tersebut tentu membutuhkan Polri untuk penertibannya.

Mengingat tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka dalam masa pandemi Covid-19, tugas pokok Polri tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya beberapa Telegram dari Kapolri (Wardhana, 2020) diantaranya sebagai berikut:

1. Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang didalamnya mengatur mengenai pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hukum.

2. Surat Telegram Nomor: ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur tentang penanganan kejahatan dalam tugas ketersediaan bahan pokok dan distribusi.
3. Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan di ruang siber.
4. Surat Telegram Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB.
5. Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur mengenai penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19.

Berdasarkan beberapa telegram yang dikeluarkan oleh Kapolri tersebut, setidaknya terdapat dua peran penting Polri di masa pandemi Covid-19. Pertama, dalam kaitannya dengan penyebaran penyakit, Polri memiliki peran kunci dalam penerapan protokol kesehatan. Selain itu ditinjau dari dukungan Aparat Polisi dalam menjalankan tugas dalam rangka terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif antara sudah diwujudkan dalam berbagai cara sebagai berikut:

1. Polri dapat disebut sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, namun untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya. Pemerintah memperkuat kewajiban physical distancing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan. Dalam konteks inilah, selain tenaga medis
2. Sudah terbentuk Kampung Siaga COVID-19 meliputi peralatan cuci tangan 1 unit, sprayer elektrik disinfektan 1 unit, thermogun 1 unit dan masker 100 lembar. Dibentuk oleh Polda Jateng sejumlah 285 titik di wilayah kota dan kabupaten Semarang.
3. Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan pembebasan sekitar 35.000 Narapidana karena adanya pandemi virus corona yang dimungkinkan dapat menyebar ke dalam Lapas yang melebihi kapasitas, sehingga dimungkinkan eks Narapidana yang dibebaskan bisa melakukan Tindak Pidana kembali. Pembebasan ini menimbulkan resiko ganda seperti meningkatnya kriminalitas tetap disertai dengan resiko terpapar dan memaparkan.
4. Adanya inovasi baru E-BHABIN yaitu aplikasi database Bhabinkamtibnas yang memberikan kemudahan dalam operasional anggota yang ingin mengajukan pengusulan mutasi dan atau kenaikan jabatan secara online.

Dalam pembahasan kali ini akan dibahas secara khusus mengenai bentuk dukungan polisi secara internal ketika berupaya mendukung penanganan Covid-19. Secara khusus penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan optimalisasi personel Bhabinkamtibnas dalam pelaksanaan tugas Polri Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng. Seperti kita ketahui bahwa era new normal membuat masyarakat lengah dan kurang sadar diri dalam menerapkan protokol era new normal. Penegakan disiplin protokol juga kurang maksimal karena kurang ada sanksi yang tegas. Maka dari itu Polri sebagai alat pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban nasional dalam menghadapi situasi pandemi ini. Langkah awalnya dimulai dari diri sendiri yaitu lingkungan internal Polri khususnya di Polda Jateng dalam memberikan suri tauladan kepada masyarakat. Oleh karenanya dalam naskah ini penulis akan mencoba mengangkat judul yaitu "Optimalisasi Strategi Polri dalam Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibnas Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng. Dengan demikian rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dengan adanya upaya optimalisasi pelaksanaan tugas Bhabinkamtibnas guna mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng?
2. Apa kaitannya aplikasi e-mutasi dengan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibnas mendukung Protokol kesehatan Covid-19?
3. Bagaimana Optimalisasi Strategi Penanganan Covid yang dilakukan oleh personel Bhabinkamtibnas?

Kondisi yang diharapkan berdasarkan rumusan masalah di atas adalah terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif melalui (1) identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dengan adanya upaya personel Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas Polri Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng dan (2) kaitan aplikasi E-Mutasi dengan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas serta (3) optimalisasi strategi aparat Polri khususnya personel Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng.

LANDASAN KONSEPTUAL

Menurut Rangkuti (1998) menjelaskan bahwa, “Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).” Dengan demikian dapat diketahui bahwa Analisis SWOT dipergunakan untuk menilai Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) dengan Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) di lingkungannya. Kekuatan adalah sumber daya yang dapat digunakan perusahaan secara efektif untuk mencapai tujuannya. Kelemahan adalah keterbatasan, kesalahan, atau cacat dalam organisasi yang akan mencegahnya mencapai tujuannya. Peluang adalah situasi yang menguntungkan di lingkungan perusahaan. Ancaman adalah situasi yang tidak menguntungkan di lingkungan perusahaan yang berpotensi merusak strateginya.

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matrik SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis

1. Strategi SO (Strength-Opportunities)
Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya.
2. Strategi ST (Strengths-Threats)
Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO (Weaknesses- Opportunities)
Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi WT (Weaknesses- Threats)
Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam hal ini adalah Polda Jateng. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah anggota Bhabinkamtibmas. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk melihat peluang, tantangan, hambatan dan kelemahan Polri dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas guna mendukung upaya pemerintah mengurangi penyebaran pandemic COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan. Dari wawancara dan observasi akan terkumpul data sehingga peneliti akan mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi yang sebenarnya.

Metode analisis data bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikan secara sistematis, kemudian diolah, ditafsirkan dan dimaknai data tersebut. Analisis data merupakan upaya pemecahan masalah penelitian untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan organisasi baik lingkungan internal dan eksternal untuk suatu tujuan tertentu. Analisis SWOT dilakukan untuk melihat dengan lebih terperinci mulai dari *strength*, *weakness*, *opportunities* hingga *threats* atas perencanaan yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan, dalam hal ini adalah merencanakan tugas Polri khususnya Bhabinkamtibmas dalam penerapan protocol kesehatan COVID-19 di Polda Jateng.

HASIL

Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tentu menjadi tugas “tambahan” yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri, pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar.

Melihat kondisi lapangan dan realitas yang ada. Kata bebas dari Covid-19 menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Seperti halnya dengan virus berbahaya lain, masyarakat akan tetap dihadapkan dan hidup berdampingan dengan virus ini namun setidaknya masyarakat memiliki pertahanan yang baik dalam melawan pandemi ini dengan menerapkan Inpres No.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang di dukung oleh aparat Polri dalam pelaksanaan menegakkan peraturan tersebut. Setidaknya warga sebelum atau sesudah warga menerima vaksin, polisi tetap memastikan warga untuk selalu mematuhi protokol sebagai berikut:

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. Membersihkan tangan secara teratur;
3. Melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan
4. Berupaya meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

Apabila didapati masyarakat yang melanggar aturan Inpres tersebut, di harapkan Aparat Polri menindak tegas oknum yang tidak tertib. Selain itu upaya jemput bola seperti patroli memastikan kepatuhan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) di lokasi-lokasi umum dilakukan secara teratur dan konsisten guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Adanya Kampung Siaga COVID-19 meliputi peralatan cuci tangan 1 unit, sprayer elektrik disinfektan 1 unit, thermogun 1 unit dan masker 100 lembar. Dibentuk oleh Polda Jateng sejumlah 285 titik di wilayah kota dan kabupaten Semarang menjadi bentuk dukungan sarpras yang harus dioptimalkan. Pengoptimalisasian ini membutuhkan adanya evaluasi dan kontrol yang rutin dan terintegratif dari aparat Polri khususnya di wilayah Polda Jateng.

Pembebasan narapidana yang menimbulkan resiko ganda seperti meningkatnya kriminalitas tetap disertai dengan resiko terpapar dan memaparkan menjadi perhatian khusus bagi unit reskrim dan bhabinkamtibnas dalam mengendalikan situasi ini agar lingkungan tetap tertib, stabil dan kondusif.

Berkaitan dengan Inpres No.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, protokol nomer 3 yaitu Melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dari sisi internal Polri di Polda Jateng diwujudkan dalam bentuk inovasi Aplikasi E-BHABIN yaitu aplikasi database Bhabinkamtibnas yang memberikan kemudahan dalam operasional anggota yang ingin mengajukan pengusulan mutasi dan atau kenaikan jabatan secara online. Harapannya ini sebagai bentuk pengembangan inovasi akibat adanya pembelajaran organisasi yang mengharuskan organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis salah satunya perubahan lingkungan yang terdampak pandemi. Maka dari itu adanya aplikasi ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga anggota menjalankan beberapa tupoksinya secara online dan fokus pada penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Agar pemanfaatan aplikasi dapat membawa pengaruh yang signifikan bagi pelaksanaan tugas Polri

secara online dan focus pada penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Polri dapat menggunakan strategi alternatif lainnya dalam percepatan penanganan pandemi yang juga seperti menerapkan Instruksi presiden (Savitri, 2020).

Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dengan adanya upaya optimalisasi aplikasi E-Mutasi Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas Polri Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng

Pandemi Covid-19 menuntut respons Polri sebagai aparat penegak hukum dalam memainkan perannya dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi kepada masyarakat, dan penindakan tindak kejahatan yang melihat wabah sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. Faktor-faktor pelaksanaan tugas Polri Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam rangka terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif terdiri Faktor Internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman/kendala.

Kekuatan

- 1) Adanya juklak, juknis, arahan, kebijakan dan strategi dapat menjadikan dasar dan pedoman yang kokoh bagi Polri dalam melaksanakan, mendukung dan mengimplementasikan pelaksanaan tugas. Kebijakan paling utama yang mendasari adalah tugas Polri yang tertuang dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, Instruksi Presiden No.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan peraturan secara hierarki berada di bawahnya.
- 2) Terciptanya aplikasi database Bhabinkamtibnas Bagbinkar Biro SDM Jateng yang diresmikan pada akhir tahun 2020 yang memudahkan aparat Polri dalam pengajuan kenaikan ataupun mutasi ke Kapolda dengan mekanisme yang telah ditentukan alurnya masing-masing bagi operator Polres maupun operator Polda.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana, material fasilitas dan jasa yang dimiliki satuan Kepolisian Jawa Tengah cukup menunjang dalam pelaksanaan tugas Kamtibmas.
- 4) Komitmen yang kuat dari jajaran kepemimpinan Polda Jateng khususnya di wilayah Resor Semarang untuk mengaplikasikan berjalannya segala kegiatan Polri dalam melaksanakan tugas sebagai garda depan dalam mewujudkan Kamtibmas di masa Pandemi. yang tercantum dalam Renja Polda Jateng tahun Anggaran 2021 yang di sahkan dalam oleh Kapolda dengan No: KEP/1756/IX/2020 yang dikenal dengan 7 Commander Wish Kapolda Jateng “Dukung Percepatan Penanganan Covid-19”.

Kelemahan

- 1) Daya dukung personel kepolisian yang jumlahnya masih belum sebanding dengan beban tugas Polri terlebih jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang perlu di layani di Wilayah Polda Jateng khususnya Semarang.
- 2) Tidak seluruh anggota Polri menguasai bidang pekerjaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sementara dalam menangani Percepatan Penanganan Covid-19 memerlukan peran tidak hanya Aparat Polri yang bertugas dan memiliki deskripsi pekerjaan Kamtibmas.
- 3) Struktur pengawas fungsi kegiatan Kamtibmas percepatan penanganan Covid-19 belum disusun secara detail pada setiap satuan kerja.
- 4) Rendahnya literasi penerimaan teknologi E-MB (E-Mutasi Bhabinkamtibmas). Personil Polri rata-rata memiliki kecenderungan pekerjaan kualitatif di lapangan sehingga lemah dalam hal yang bersifat detail dan kuantitatif.
- 5) Banyak jumlah personel kepolisian yang berkurang akibat virus ini, karena dalam praktiknya ternyata banyak juga personil kepolisian yang terpapar virus ini sehingga berdampak pada pelaksanaan teknis di lapangan.

- 6) Dukungan anggaran belanja tenaga, belanja modal dan belanja barang untuk menjalankan kegiatan patroli, dukungan logistik serta anggaran kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat masih sangat dirasakan kurang.

Peluang

- 1) Sudah tersedianya Vaksin sebagai solusi awal pencegahan Covid-19. Selain itu Presiden mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulungan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kemudian di tekankan oleh peraturan dari Menkes dan pihak lain dengan tegas.
- 2) Masyarakat di Wilayah Semarang merupakan masyarakat yang sebagian besar memiliki kesadaran tinggi dalam ikut membantu mendukung pemerintah, tenaga medis dan Polri dalam menangani Covid-19 sehingga harapan dan dorongan masyarakat serta antusiasme pemerintah (mulai tingkat propinsi sampai desa) serta dari kelompok komunitas, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menanggapi dan mendorong pelaksanaan kebijakan dan strategi Polri tentang percepatan Penanganan Covid-19.
- 3) Semarang merupakan Ibu Kota Jawa tengah dan memiliki banyak industri, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas UMKM dan Karyawan terdampak Covid-19, pemulihan penanganan Covid-19 di Kota Semarang dapat memulihkan perekonomian secara keseluruhan di Jawa Tengah.

Kendala

- 1) Isu-isu politik yang berkembang secara liar yang diwujudkan dalam bentuk informasi elektronik dan aktivitas-aktivitas mempengaruhi massa secara langsung atau melalui media misalnya tentang kontroversi penggunaan Vaksin Sinovac.
- 2) Beberapa kantor / pabrik masih tetap beroperasi karena tidak memungkinkan untuk menerapkan aturan *work from home* (WFH).
- 3) Oknum public figure yang memberikan pengaruh kurang baik atas upaya pemerintah dalam memberikan Vaksin sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19.
- 4) Masyarakat memiliki multitafsir yang berujung salah tafsir yaitu seputar Covid-19. Infodemi yang berlebih ini dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah seputar Covid-19. Misalnya info hoax tentang obat Covid-19.
- 5) Sarana dan prasarana kesehatan pendukung dalam menangani penambahan kasus positif Covid-19 masih terbatas sehingga membatasi ruang gerak Polri dalam menangani kasus Covid-19 seperti produksi perlengkapan, peralatan dan sebagainya
- 6) Masih tetap ada dan harus mewaspadai kriminalitas yang tinggi akibat pembebasan nara pidana sebanyak 35.000 disertai kemerosotan ekonomi dan kesulitan mencari penghasilan membuat oknum melakukan tindak kriminalitas

Kaitan Aplikasi E-MUTASI dengan tugas Polri khususnya Bhabinkamtibmas dalam penerapan Protokol Kesehatan Percepatan Penanganan Covid

Berkaitan dengan Inpres No.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, protokol nomer 3 yaitu Melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), dari sisi internal Polri di Polda Jateng diwujudkan dalam bentuk inovasi Aplikasi E-BHABIN yaitu aplikasi database Bhabinkamtibmas yang memberikan kemudahan dalam operasional anggota yang ingin mengajukan pengusulan mutasi dan atau kenaikan jabatan secara online. Harapannya ini sebagai bentuk pengembangan inovasi akibat adanya pembelajaran organisasi yang mengharuskan organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis salah satunya perubahan lingkungan yang terdampak pandemi. Maka dari itu adanya aplikasi ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga anggota menjalankan beberapa tupoksinya secara online dan fokus pada penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing.

Agar pemanfaatan aplikasi dapat membawa pengaruh yang signifikan bagi pelaksanaan tugas Polri secara online dan focus pada penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing. Polri dapat menggunakan strategi alternatif lainnya dalam percepatan penanganan pandemi yang juga seperti menerapkan Instruksi presiden (Savitri, 2020). Perlunya tambahan personil pada daerah-daerah yang rawan Covid-19 atau cluster Covid memerlukan gerak cepat penempatan sumber daya manusia dengan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. E-Mutasi ini sangat membantu dilaksanakannya penempatan personil bhabinkamtibmas tersebut sehingga proses penanganan siaga dapat berjalan dengan lancar.

Optimalisasi strategi pemberdayaan aparat Polri sebagai sumber daya pendukung dengan adanya upaya optimalisasi personel Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng

Adapun strategi yang dibuat oleh penulis dengan landasan teori analisa SWOT, yaitu penilaian terhadap hasil identifikasi situasi untuk menentukan kategori suatu kondisi sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/kendala yang selanjutnya diidentifikasi guna menentukan cara solusi atau alternatif pemecahan masalah (*Problem Solving*) yang dihadapi sehingga tercipta suatu kondisi sebagaimana yang diharapkan (Rangkuti, 1998).

Penulis melakukan analisa SWOT yaitu dengan mengkombinasikan Kekuatan dengan Peluang (S.O), Kelemahan dan Peluang (W.O), Kekuatan dan Ancaman (S.T) serta Kelemahan dan Ancaman (W.T), maka penulis dapat menentukan, menganalisa dan memformulasikan strategi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan tugas Polri Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam rangka terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif tersaji dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan - Kebijakan dasar penanganan - Aplikasi E-MB (E-Mutasi Bhabinkamtibmas) - Sarpras Kamtibmas - Komitmen Pimpinan	Kelemahan - Jumlah personel terbatas - Penguasaan bidang Kamtibmas - Rendahnya literasi penerimaan teknologi E-MB (E-Mutasi Bhabinkamtibmas) - Struktur tiap satker penanganan Covid-19 belum dievaluasi - Personil terpapar Covid-19 - Kurangnya dukungan anggaran
	Peluang - Tersedia vaksin sinovac - Aparat Polri dan Masyarakat punya kesadaran tinggi - Semarang lokasi percontohan yang strategis	Strategi WO 1) Berupaya menambah pengetahuan dan skill Kamtibmas meskipun personil bukan dinas di Ditsamapta/unit Bhabinkamtibmas 2) Personel menjadi prioritas dalam vaksinasi agar aman dalam menjalankan tugas fungsi kamtibmas penanganan Covid-19
	Startegi SO 1) Pemerintah membuat kebijakan vaksinasi dan bersama Polri melaksanakan dan menertibkan kebijakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. 2) Pimpinan Memberikan sosialisasi kepada bawahan untuk terus mengedukasi masyarakat guna percepatan penanganan Covid-19	

	3) Memanfaatkan Sarpras Kamtibmas semaksimal mungkin dalam menangani kasus Covid di kota Semarang untuk patroli, pengendalian dan sebagainya. 4) Adanya aplikasi E-MB (E-Mutasi Bhabinkamtibmas) memberikan kemudahan aparat di wilayah. Aparat terkait dapat tetap fokus menjalankan tugas penanganan Covid-19 di wilayah mereka sambil mengelola karir mereka masing-masing tanpa harus datang ke Polda sehingga tetap mendukung protokol PSBB. 5) Pemerintah memberikan kebijakan bantuan pada UMKM / IKM di kota Semarang untuk merangsang perekonomian, Polri mengawasi dan menertibkan pendistribusian dengan baik	3) Menambah anggaran dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat dan juga untuk kesehatan seperti pengadaan sarpras penanganan Covid-19 4) Aparat Polri khususnya yang memiliki peran menjalankan tugas Kamtibmas meningkatkan kesadaran untuk melakukan pembelajaran teknologi E-MB (E-Mutasi Bhabinkamtibmas) yang ebrmanfaat untuk mendukung pelaksanaan Protokol penanganan Covi-19. 5) Menekankan struktur tiap satker bahwa tugas menangani Covid-19 di Semarang bukan hanya tanggung jawab bidang tertentu namun seluruh personil di semua bidang
Kendala/Ancaman - Isu politik - Pabrik, kantor dan instansi yang tetap WFO - Pengaruh publik figure yang kontroversial - Infodemik - Sarpras pendukung terbatas - Kriminalitas di masa Pandemi	Startegi ST 1) Kebijakan pemerintah (Kominfo) dalam memberikan sanksi tegas penyebar hoax, arahan filter informasi masyarakat terhadap informasi 2) Pemerintah melalui kominfo terus menyaring informasi yang beredar di masyarakat seperti isu politik, infodemik dan hoax secara integratif 3) Memantau tempat kerja masyarakat yang WFO dan patroli di tempat umum agar sarpras kamtibmas digunakan secara optimal 4) Adanya aplikasi E-MB (E-Mutasi Bhabinkamtibmas) meminimalkan isu lobi politik yang melingkupi peningkatan dan mutasi personil Polri sehingga tiap personil dapat memantau perkembangan melalui aplikasi setelah memenuhi hak dan menerima kewajibannya. 5) Pimpinan Memberikan intruksi tegas dalam	Startegi WT 1) Personel tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tetap waspada dengan kriminalitas pandemi 2) Menambah anggaran untuk pengadaan sarpras pendukung penanganan Covid-19 yang diperlukan untuk kegiatan dalam tubuh Polri itu sendiri 3) Personel Polri menjalankan WFO dengan baik, hati-hati dan mematuhi kebijakan protokol 4) Personil yang khususnya memiliki tupoksi kamtibmas memanfaatkan sarpras dan menjalankan WFO dengan baik dengan terus berusaha menguasai Aplikasi E-MB (E-Mutasi Bhabinkamtibmas) yang dapat menunjang kinerja karir kepolisian. 5) Dengan terbatasnya personel Polri diharapkan masyarakat mendukung segala kegiatan Polri dengan pemerintah dan

	memberantas kriminalitas pandemi.	saling menjaga serta mengingatkan untuk tetap bekerjasama menekan kasus Covid-19
--	-----------------------------------	--

Tabel di atas menjelaskan memanfaatkan seluruh kekuatan Polri seperti kebijakan, sarpras dan aplikasi untuk memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya dalam menangani Covid-19 (Strategi SO). Polri menggunakan kekuatan Polri khususnya Polda Jateng yang dimiliki untuk mengatasi ancaman infodemic dan kriminalitas (Strategi ST). Pemanfaatan peluang vaksin dijalani guna meminimalkan kelemahan yang ada salah satunya adanya keterbatasan personel (Strategi WO). Kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan dari sisi SDM Polri yang ada dalam menghindari ancaman kriminalitas dan infodemic (Strategi WT).

SIMPULAN

Sebagai aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tentunya Polri memiliki andil dalam penanggulangan pandemic Covid-19. Langkah awal yang dapat dimulai Polri adalah dari lingkungan internal Polri khususnya di Polda Jateng dilanjut ke faktor eksternalnya. Faktor internal yang dimiliki Polri dalam upaya optimalisasi personel Bhabinkamtibmas yang menjadi kekuatannya dalam pelaksanaan tugas Polri Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng adalah adanya kebijakan terkait dasar dan pedoman juga instruksi presiden untuk pelaksanaan tugas Polri dalam mengati pandemic. Dibuatnya aplikasi E-MB serta adanya sarana dan prasarana, material fasilitas dan jasa juga komitmen dalam diri Polri dapat menunjang Polri dalam melaksanakan tugasnya. Penempatan personel dapat berjalan cepat dan lancar sehingga aparat Bhabin siaga pada pengamanan Cluster Covid yang dituju. Namun, dari semua itu ada pula kelemahannya, yaitu jumlah personel yang terbatas, kurangnya personel yang menguasai bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, belum disusunnya struktur pengawas fungsi kegiatan Kamtibmas, rendahnya literasi penerimaan teknologi E-MB, adanya personel terpapar Covid dan kurangnya dukungan anggaran.

Faktor eksternal yang menjadi peluang berhasilnya Polri dalam upaya optimalisasi aplikasi E-Mutasi Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas Polri Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng adalah tersedianya vaksin, masyarakat yang sudah memiliki kesadaran tinggi, Semarang yang memiliki banyak industri, menunjukkan bahwapemulihan penanganan Covid-19 di Kota Semarang dapat memulihkan perekonomian di Jawa Tengah. Disamping peluang tersebut adapula kendala yang perlu diwaspadai, yaitu isu-isu politik tentang kontroversi penggunaan Vaksin Sinovac, masih diterapkan aturan WFH, pengaruh public figure atas upaya pemberian Vaksin, Infodemic seputar Covid-19, sarana dan prasarana yang terbatas, kriminalitas yang tinggi saat pandemic.

Meninjau faktor internal dan eksternal tersebut diperlukan strategi yang mampu mengoptimalkan pemberdayaan aparat Polri sebagai sumber daya pendukung dengan adanya upaya optimalisasi aplikasi E-Mutasi Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Polda Jateng. Strategi tersebut dapat berupa upaya Polri dalam merubah kelemahannya menjadi peluang berhasilnya pelaksanaan tugas juga menggunakan kelemahannya untuk mengatasi kendala yang menimpa. Serta upaya dengan memanfaatkan peluang menjadi kekuatannya dan kendala yang menimpa menjadi kakuatannya untuk mencapai keberhasilan. Dengan analisis SWOT dalam penelitian ini diharapkan Polri mampu menerapkan strategi yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sangat tergantung pada interpretasi peneliti tentang makna tersirat dalam wawancara sehingga

kecenderungan untuk bias masih ada. Untuk mengurangi hal tersebut maka dilakukan triangulasi metode yaitu dengan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yaitu metode wawancara dan observasi dilakukan triangulasi sumber yaitu dengan melakukan cross check data dengan fakta dari informan yang berbeda serta dari penelitian lainnya.

Oleh karena itu, diharapkan Kepolisian tidak pernah lelah untuk membantu pemerintah bersama aparat TNI dan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penindakan terhadap para pelanggar protokol kesehatan guna menekan penyebaran Covid-19 untuk meminimalisasi korban yang terpapar.

DAFTAR PUSTAKA

[http://kompasiana.com/Dampak_Pandemi_COVID-19_Terhadap_Perekonomian_Indonesia - Kompasiana.com](http://kompasiana.com/Dampak_Pandemi_COVID-19_Terhadap_Perekonomian_Indonesia_-_Kompasiana.com)

Inpres No.6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Rangkuti, F. (1998). Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis. Gramedia Pustaka Utama.

Rencana Kerja Kepolisian Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 dengan lampiran Keputusan Kapolda Jateng No: KEP/1756/IX/2020 Tanggal:18 September 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Savitri, F. M., & Naili, Y. T. (2020). Henry Mintzberg's Business Management Strategy Post-Pandemic Covid-19 (Social Learning Approach on Ali Murah Shop Madinah). International Journal of Social Learning (IJSL), 1(1), 62-74.

Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Wardhana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Kepolisian, 14(2), 9.